

Kejaksaan Tunggu Hasil Audit BPK

● Dugaan Korupsi Pengadaan LPJU

TINGKIR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah menyelesaikan audit proyek pengadaan meterisasi dan lampu penerangan jalan umum (LPJU) tahun 2009 yang kini disidik Kejaksaan Negeri Salatiga.

Namun sebelum menyerahkan hasil audit ke penyidik, mereka akan meminta pengesahan terlebih dahulu kepada pusat.

Hal itu dikemukakan Kajari Salatiga Darmo Wijoyo, di ruang kerjanya, Selasa (10/9).

"Informasinya audit sudah diselesaikan BPK Jateng namun menunggu pengesahan dari pusat. Hasil audit itu masih kami

tunggu," tuturnya.

Dikatakan, audit dimintakan kejaksaan setelah pihaknya menggelar perkara bersama dengan BPK beberapa waktu lalu. Dugaan korupsi pengadaan LPJU disidik kejaksaan sejak awal tahun ini. Tahun 2009, Pemkot Salatiga melakukan pengadaan LPJU dengan anggaran Rp 9,468 miliar.

Diduga dalam proyek yang

dikerjakan PT Analum Jior itu terdapat penyelewengan melalui penggelembungan anggaran. Kejaksaan kemudian melakukan penyelidikan yang ditingkatkan menjadi penyidikan.

Pengadaan tersebut merupakan proyek di bawah kewenangan Dinas Tata Kota Salatiga yang saat itu dikepalai Tri Priyo Nugroho, yang sekarang menjabat Asisten I Setda Salatiga. Sebagai pejabat pembuat komitmen adalah Edward Manoppo.

Penetapan Tersangka

Darmo menuturkan, audit dimintakan kepada BPK guna mengetahui ada tidaknya kerugian negara dalam proyek tersebut. Bila ada, maka akan dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka.

"Bukti lain sudah ada, tinggal kerugian negaranya nanti didasarkannya audit BPK," tutur mantan

Kajari Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung itu.

Syamsu Yufriald, pejabat pendahulu Darmo sebelumnya mengungkapkan telah mengantongi nama tersangka.

Hal itu kemudian dibantah Darmo yang menyatakan pihaknya belum menentukan tersangka, karena masih menunggu audit BPK.

Atas perbedaan itu, ia kembali menegaskan, penentuan tersangka harus dilakukan hati-hati sehingga tidak membuka peluang penyidikan dihentikan di kemudian hari karena kurang bukti.

"Saya katakan dalam bekerja kami tidak ingin mendzolimi orang dengan cepat-cepat menentukan tersangka. Jangan sampai, nanti malah dapat dihentikan karena kurang bukti," katanya. (J21-87)